

## IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Siti Nurhidayatul Hasanah<sup>1</sup>, Duwi Habsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STAI Muhammadiyah Tulungagung

<sup>2</sup> STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Pacitan

Email: [sitinur@gmail.com](mailto:sitinur@gmail.com)<sup>1</sup>, [duwi@gmail.com](mailto:duwi@gmail.com)<sup>2</sup>

---

DOI: -

Received: 09-04-2023

Accepted: 15-04-2023

Published: 30-04-2023

---

### Abstrak:

Full scale Quality Management (TQM) happening if school or Islamic Junior High School does development and education upgrade chronically. Full scale Quality Management (TQM) happening if school has done quality surety management (Full scale Quality Assurance). Its mean is quality surety management happens if headmaster perform its leadership function with every consideration, so becomes support for management success all education component. In other words that curriculum business success, student's business, thing's medium business, subjective business with society, finances and administration will very dependent on madrasah's headmaster or head leadership as top leader.

**Kata Kunci:** Implementasi, Total Quality Manajemen (TQM), Manajemen Pendidikan.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Mulyasa menyatakan bahwa Dalam kondisi apapun komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan hendaknya tidak berubah. Pemerintah komitmen untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan. Hal ini penting agar setelah melewati masa krisis, nasib bangsa Indonesia, agar tidak semakin terpuruk.

Pendidikan adalah salah satu langkah untuk mempersiapkan putra dan putri bangsa supaya bisa bersaing di era globalisasi dan digital pada masa mendatang. Oleh karena itu, tentunya peningkatan mutu pendidikan haruslah dimulai dari tingkat satuan pendidikan.

Juga diamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab I pasal 1 yang menyatakan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Di samping itu, pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada era globalisasi dan pasar bebas, bangsa Indonesia menghadapi satu era yang kompetitif, ke suasana persaingan yang semakin ketat. Kondisi yang demikian ini dapat diantisipasi dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang kompetitif, cara yang paling tepat adalah dengan mempersiapkan sumber daya yang berkualitas untuk menghadapi era globalisasi dan mampu menghadapi tantangan zaman. Gambaran tantangan manusia masa industrialisasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Kaya informasi (*well informed*) dan sikap belajar seumur hidup, 2) Mampu bernalar secara rasional, 3) Memiliki sikap kreatif terhadap tantangan baru, memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kemampuan, berinovasi dan bertanggung jawab.

Dalam usaha menyiapkan sumber daya manusia masa depan yang berkualitas pendidikan mengemban amanat yang sangat besar, di mana dunia pendidikan adalah wahana yang lebih besar dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia. Sebagai modal dan pelaku pembangunan dalam negara yang kita cintai ini. Dalam konteks inilah pendidikan akan semakin dituntut peranannya. Untuk memainkan peranan ini, pendidikan nasional harus diselenggarakan secara adil, relevan, berkualitas, efektif dan efisien.

Ada tiga tahap konsep manajemen mutu pendidikan menurut Muhaimin yaitu: Tahap Pertama: Infentarisasi, penetapan, *stakeholder* dan kegiatan utama lembaga pendidikan (infentarisir dan penetapan kebutuhan *stakeholder*, mengidentifikasi *stakeholder* potensial, menganalisis *stakeholder* potensial); Tahap Kedua: Memformulasi strategi lembaga Pendidikan (mengembangkan visi dan misi, penetapan tujuan strategis, menganalisis SWOT, melakukan pengukuran kinerja, mengidentifikasi fokus strategi, evaluasi portofolio, Tahap Kedua: Mengembangkan rencana kegiatan utama (penentuan sasaran, pengembangan rencana program, penetapan rencana aktifitas, seleksi teknis analisis)

Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan terutama oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas juga.

Madrasah merupakan unit pertama dan terdepan dalam melaksanakan pendidikan yang berfungsi membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia. Berkaitan dengan itu pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas kurikulum, menerbitkan berbagai buku, yang diperlukan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan melalui berbagai program pembangunan dan proyek pendidikan. Program dan proyek pengembangan pendidikan tersebut diharapkan dapat menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah atau sekolah.

Sehubungan dengan itu maka madrasah harus menyusun program yang

berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Untuk melaksanakan program atau kegiatan madrasah, kepala madrasah memegang peranan puncak selaku top manajer di madrasah tersebut. Kepala madrasah harus menangani seluruh kegiatan agar semua potensi yang ada di madrasah berfungsi secara optimal dalam mendukung tujuan pendidikan madrasah.

Mulyasa mengatakan bahwa Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi pada mutu. Strategi ini dikenal dengan *Total Quality Manajemen (TQM)*. Strategi ini merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas layanan, sehingga fokusnya diarahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

Visi dan Misi yang terarah dan jelas serta pengelolaan madrasah secara profesional akan menghasilkan profil madrasah yang dapat diharapkan. Profil madrasah yang dilihat melalui pengelolaan madrasah, sedangkan pelaksanaan visi dan misi madrasah dapat dilihat dari mutu prestasi belajar yang dicapai murid. Sementara ini, indikator yang menjadi salah satu tolok ukur prestasi murid adalah Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN). Dari uraian di atas, penulis berupaya mengkaji dalam bentuk tema "Implementasi *Total Quality Manajemen (TQM)* dalam Manajemen Pendidikan".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian *Total Quality Manajemen (TQM)*

*Total Quality Management (TQM)*, atau juga disebut Total Quality Manajemen (TQM) (MMT) menurut Edwar Sallis merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya sehingga menghasilkan mutu yang tinggi.

Menurut Hadari Nawari, Manajemen Mutu Terpadu (TQM) adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus di fokuskan pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum (public service) dan pembangunan masyarakat (*community development*)

Mulyasa mengatakan bahwa *Total Quality Management (TQM)* merupakan usaha dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas layanan, sehingga fokusnya diarahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah, dan masyarakat.

Gerakan TQM dimulai di bidang industri di Amerika Serikat antara pada tahun 1920 s/d 1940 dan di Jepang pada sekitar tahun 1950 tokohnya antara lain Deming, Sheward, dan Juran yang menyatakan bahwa mulailah dengan apa yang diinginkan pelanggan, selain organisasi juga memiliki standar yang tinggi. Berdasarkan ide tersebut, Jepang mengembangkannya dan

ternyata berhasil. Keberhasilan ini dianggap suatu revolusi dalam bidang manajemen dari uraian di atas sebenarnya menunjuk pada organisasi yang unggul/bermutu adalah: organisasi yang harus dekat dengan pelanggan, memiliki obsesi mutu, memiliki birokrasi berdasarkan aktivitas dan antusias anggota.

*Total Quality Management (TQM)* terjadi apabila sekolah atau madrasah melakukan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan. *Total Quality Manajemen (TQM)* terjadi apabila sekolah telah melakukan manajemen jaminan mutu (*Total Quality Assurance*). Artinya manajemen jaminan mutu terjadi apabila kepala sekolah melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik, sehingga menjadi tumpuan bagi keberhasilan manajemen semua komponen pendidikan.

Dengan kata lain bahwa keberhasilan urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana-prasarana, urusan hubungan dengan masyarakat, urusan keuangan dan tata usaha akan sangat bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah atau kepala madrasah sebagai *top leader*-nya

Pelaksanaan manajemen jaminan mutu di sekolah merupakan langkah awal menuju pelaksanaan *Total Quality Manajemen (TQM)*. (*Total Quality Management (TQM)*) yang dalam konteks manajemen sekolah disebut MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah).

Sekolah bisa menghasilkan lulusan yang bermutu apabila penyelenggaraan pendidikan mutunya juga terjamin. Mutu pendidikan akan terjamin ketika kepala sekolah melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan baik dan dibarengi komponen pendidikan yang berkualitas juga.

### **Pentingnya Total Quality Manajemen (TQM) dalam Memajukan Lembaga Pendidikan**

Dalam dunia pendidikan kita saat ini, persoalan kuantitas vs kualitas merupakan dilema yang tidak mudah untuk dipecahkan. pada satu pihak, kita ingin memenuhi kebutuhan kependidikan yang bersifat kuantitatif dalam berbagai aspeknya, di lain pihak masyarakat semakin deras dan nyaring menghendaki agar masalah mutu atau kualitas segera menjadi perhatian, TQM merupakan suatu pola manajemen yang berisi prosedur agar setiap orang dalam organisasi berusaha keras secara terus menerus memperbaiki jalan menuju sukses.

Desentralisasi pendidikan, sebagaimana tuntutan reformasi, adalah sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Secara konseptual, MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) yang selanjutnya penulis memakai sebutan MBS, merupakan cara bagaimana mengelola pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Konsep ini memberikan sekolah atau madrasah sebagai unit yang pertama dan utama dalam meningkatkan layanan dibidang pendidikan.

Kepala sekolah harus mengembangkan program pendidikan secara menyeluruh, kepala sekolah/ kepala madrasah bersama-sama dengan *stakeholders* harus merumuskan program yang lebih operasional sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah/ madrasah, sekaligus sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu alternatif atas jawaban tuntutan otonomi pendidikan, Hadiyanto mengatakan Dalam konteks Indonesia, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk membuat agar sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumberdaya, mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Depdiknas merumuskan pengertian MBS sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional, sedangkan Depag RI mengembangkannya dalam bingkai "Madrasah Mandiri". Mandiri dalam mengelola program dan sumber daya.

Bagimanapun bentuk atau model yang diambil oleh setiap lembaga pendidikan dalam rangka menerapkan *Total Quality Manajemen (TQM)* di dalam kerangka MPMBS, lembaga pendidikan diberikan keleluasaan dan keluwesan.

Lembaga pendidikan diberi kewenangan penuh untuk menyusun struktur kurikulum dengan mengacu pada Permendiknas tentang standar isi, dengan harapan mutu pendidikan bisa ditingkatkan sesuai dengan sarana yang dimiliki. Disisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kewenangan dan keleluasaan yang diberikan, karena otonomi pendidikan, bisa berbalik. Kualitas pendidikan tidak bisa ditingkatkan tetapi justru mengalami kemunduran. Oleh karena itu kehadiran Permendiknas 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tepat.

Dengan adanya Permendiknas tersebut di atas, penyelenggaraan pendidikan bisa terarah, terukur, terkontrol, paling tidak persyaratan minimal bisa tercapai. Hal ini terjadi karena, sebagaimana disampaikan Malik Fajar, "pengambilan keputusan bersama di kalangan stakeholder pada level sekolah merupakan kunci utama dalam melaksanakan MBS".

Terarah, karena persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah diperhatikan untuk menentukan standar minimal. Terukur, karena program pendidikan dibuat program secara jelas sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga bagi lembaga pendidikan tidak ada alasan untuk berkecil karena dipaksa oleh pemerintah dan bisa mengukur seberapa keberhasilan program-programnya. Terkontrol karena semua kelompok kepentingan dilibatkan untuk fungsi pengawasan, sehingga kemungkinan untuk menyeleweng dari patokan yang telah disepakati adalah kecil.

Dengan demikian, maka sekolah yang efektif yang mensyaratkan adanya keleluasaan sekolah untuk mengelola dan mengambil keputusan secara mandiri dan memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas, dalam rangka manajemen mutu terpadu bisa terlaksana.

Disamping itu , alasan mengapa harus *Total Quality Manajemen (TQM)*,

adalah: a) Untuk memberikan jaminan mutu atau meningkatkan kualitas pendidikan, b) Meningkatkan keterlibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, c) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada masyarakat dan pemerintah, d) Adanya kompetisi kualitas pendidikan, sehingga: (1) Diberikannya otonomi yang lebih besar pada sekolah, (2) Adanya fleksibilitas pengelolaan sumberdaya yang ada, (3) Mengetahui kekurangan/kelemahan yang ada, keunggulan/potensi yang dimiliki, peluang yang ada, dan tantangan yang dihadapi, (4) Diketahui kebutuhan, baik sekolah ataupun warga sekolah, (5) Penggunaan sumberdaya bisa efektif dan efisien, (6) Terciptanya transparansi dan demokrasi di sekolah.

### **Implementasi dalam Menerapkan Total Quality Manajemen (TQM).**

Manajemen pendidikan madrasah/manajemen madrasah merupakan manajemen substansi-substansi pendidikan di madrasah atau manajemen berbasis sekolah (*school basic management*). Menurut Mulyasa paling sedikit terdapat tujuh komponen madrasah yang harus dikelola yaitu: “kurikulum dan program pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat serta manajemen pelayanan khusus”.

#### **a. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Manajemen kurikulum dan program pengajaran di madrasah melalui 4 tahap yaitu: perencanaan, pengorganisasian/koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian.

Tahap perencanaan kurikulum ini perlu dijabarkan sampai menjadi skenario pembelajaran dengan tahap yang pertama menyusun silabus dari suatu mata pelajaran, menyusun program tahunan, menyusun program semester, menyusun program pembelajaran. Masing-masing madrasah harus memiliki kalender pendidikan yang jelas, menghitung hari kerja yang efektif.

Untuk pengorganisasian kepala madrasah bertanggung jawab terhadap pembagian tugas, menyusun jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam hal pembelajaran, model Manajemen Berbasis Sekolah ini menekankan kepada pembelajaran aktif, pembelajaran efektif dan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan demikian siswa benar-benar asyik belajar dan betah tinggal di kelas karena guru tidak berperan sebagai orang paling tahu, melainkan sebagai fasilitator yang dinamik dan kreatif.

Tahap terakhir dalam poses belajar mengajar adalah pengendalian yang meliputi 2 aspek yaitu: jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuan dan pemanfaatan hasil.

#### **b. Manajemen Tenaga Pendidikan**

Suatu madrasah dapat berhasil apabila kepala madrasah dapat mengelola tenaga pendidikan, yang tersedia di madrasah. Dalam hal ini,

peningkatan produktifitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia ditempat kerja melalui Implementasi konsep manajemen personalia yang modern.

Manajemen tenaga pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam posisi yang menyenangkan.

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah, berkaitan dengan hal ini, tugas kepala sebagai pemimpin utama sekolah adalah:

- a. Identifikasi staf guru baru, penugasan, orientasi, evaluasi dan pengembangan staf dan guru.
- b. Menciptakan kondisi fisik dan psikis yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kemampuan dan kreatifitas guru.
- c. Mengadakan perubahan budaya di sekolah antara lain: perubahan budaya ke arah mutu pada staf dan guru.
- d. Memotifasi staf dan guru untuk dapat bekerjasama secara sukarela dalam mencapai tujuan organisasi.
- e. Membentuk sikap dan kemampuan guru menjadi profesional.

Menurut Mulyasa manajemen tenaga pendidikan mencakup: a) Perencanaan pegawai, b) Pengadaan pegawai, c) pembinaan dan pengembangan pegawai, d) promosi dan mutasi, e) Pemberhentian pegawai, f) kompetensi, dan g) Penilaian pegawai.

Perencanaan pegawai merupakan kegiatan yang menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk sekarang dan masa depan. Penyusunan rencana personalia yang tepat dan baik harus mendapatkan tentang informasi tentang pekerjaan dan tugas yang dilakukan dalam madrasah. Oleh sebab itu sebelum menyusun rencana perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan.

Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga/madrasah, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai kebutuhan, dilakukan rekrutmen yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, kemudian dipilih calon yang terbaik.

Fungsi pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak dibutuhkan, untuk memperbaiki menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara *on the job training* dan *in service training*. Pembinaan dan pengembangan itu tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut pegawai. Pembinaan ini diharapkan agar personil-personilnya melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuannya untuk organisasi dan bekerja baik dari hari ke hari.

Setelah tenaga pendidikan lulus melaksanakan *job training* diteruskan pengangkatan, penempatan atau penugasan. Dalam penugasan ini diusahakan adanya kesesuaian dengan karakteristik pegawai.

Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya hubungan organisasi dan personil dari hak dan

kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan pegawai.

### **c. Manajemen Kesiswaan**

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah.

Manajemen kesiswaan bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan di madrasah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki 3 tugas yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Menurut Sutisna yang dinukil oleh Mulyasa, tanggung jawab kepala madrasah dalam mengelola bidang kesiswaan adalah : a) Kehadiran di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, b) Penerimaan, orientasi, klasifikasi dan menunjukkan murid ke kelas dan program studi, c) Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar, d) Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti: pengajaran, perbaikan dan pengajaran luar biasa, e) Pengendalian disiplin murid, f) Program bimbingan dan penyuluhan, g) Program kesehatan dan keamanan, h) Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional.

Penerimaan murid baru perlu dikelola mulai perencanaan, penentuan daya tampung madrasah/ jumlah murid baru yang akan diterima. Setelah murid diterima diadakan pengelompokan dan orientasi secara fisik, mental dan emosional agar siap untuk mengikuti pendidikan di madrasah.

Untuk mencapai kemajuan prestasi belajar para murid memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan/ prestasi kepala madrasah sebagai manajer pendidikan di madrasah.

Madrasah tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan kepada murid, tapi juga memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

### **d. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen pembiayaan berbasis sekolah perlu dilaksanakan dengan seksama untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan prestasi peserta didik. Kegiatan manajemen pembiayaan mencakup tiga kegiatan pokok yaitu: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan/ pembiayaan adalah sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya suatu tujuan pendidikan. Sumber keuangan dan pembiayaan pada sekolah terdiri dari 3 sumber, yaitu: a)

Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, b) Orang tua / peserta didik, c) Masyarakat baik mengikat/ tidak mengikat.

Manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 3 fase yaitu: perencanaan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan evaluasi. Perencanaan finansial merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa ada yang dirugikan. Pelaksanaan anggaran ialah kegiatan yang berdasarkan rencana yang telah dibuat. Evaluasi merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Kepala madrasah sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonotor, namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan.

#### **e. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat digunakan secara optimal. Manajemen sarana dan prasarana ini mempunyai kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses belajar- mengajar. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik adalah manajemen yang bisa menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru atau murid, dan menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses belajar mengajar.

#### **f. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat**

Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan maksud meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan prakteknya dalam usaha memperbaiki sekolah.

Sekolah (madrasah) dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Apabila hubungan madrasah dengan masyarakat berjalan dengan baik, maka rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat pada madrasah akan baik dan tinggi.

Agar hubungan masyarakat dan madrasah berjalan dengan baik, serasi dan harmonis, maka masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang madrasah. Keadaan madrasah yang jelas ini bisa diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, atau sarana lainnya, seperti kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid.

Kepala madrasah bertugas menciptakan hubungan yang baik antara madrasah dan masyarakat. Kepala madrasah harus berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara madrasah dan masyarakat guna mewujudkan madrasah yang efektif dan efisien.

#### **g. Manajemen Layanan Khusus**

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan dan keamanan madrasah. Manajemen ini merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan madrasah yang efektif dan efisien.

Dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berlangsung dengan pesat pada masa sekarang, menyebabkan guru tidak mampu memberikan pelayanan akan informasi yang dibutuhkan oleh murid. Guru tidak bisa hanya mengandalkan apa yang diperolehnya pada waktu kuliah.

Layanan khusus lainnya adalah perpustakaan. Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik akan membantu peserta didik dalam mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas, dengan cara belajar secara mandiri baik pada waktu kosong di madrasah maupun di luar madrasah.

Manajemen layanan khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan. Madrasah sebagai satuan pendidikan yang bertanggung jawab melaksanakan proses belajar-mengajar, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap saja, tapi juga meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani anak. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani.

Untuk kepentingan tersebut madrasah mengembangkan program pendidikan jasmani dan kesehatan melalui usaha kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Disamping itu perlu pelayanan keamanan kepada peserta didik dan pegawai yang ada di sekolah agar mereka dapat bekerja dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.

Apabila keenam komponen di atas di-*manage* dengan baik dan benar, semua komponen telah melaksanakan tugasnya, maka strategi yang diambil kepala sekolah dalam rangka *Total Quality Manajemen (TQM)*, akan menghasilkan layanan prima dan dengan proses yang baik akan menghasilkan *out come* yang baik pula.

## KESIMPULAN

Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan terutama oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas juga.

Madrasah merupakan unit pertama dan terdepan dalam melaksanakan pendidikan yang berfungsi membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia. Berkaitan dengan itu pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas kurikulum, menerbitkan berbagai buku, yang diperlukan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan melalui berbagai program pembangunan dan proyek pendidikan. Program dan proyek pengembangan pendidikan tersebut diharapkan dapat menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah atau sekolah.

Untuk melaksanakan program atau kegiatan madrasah, kepala madrasah memegang peranan puncak selaku top manager di madrasah tersebut. Kepala madrasah harus menangani seluruh kegiatan agar semua potensi yang ada di madrasah berfungsi secara optimal dalam mendukung tujuan pendidikan madrasah. Strategi ini dikenal dengan *Total Quality Manajemen (TQM)*. Strategi ini merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas layanan, sehingga fokusnya diarahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

Iniilah berkaitan dengan manajemen diri (pesonal) namun dapat diterapkan dalam konteks amal sosial termasuk pula dalam manajemen pendidikan Islam. Jika kita mengaitkan hal tersebut dengan sistem manajemen pendidikan Islam, maka niat tersebut dengan *Pleaning, An-Nashabu di identik dengan organization dan actuating sedangkan Muhasabah, Tasyakkur dan Tawakkal* terkandung sebagai *controlling*. Penghayatan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam manajemen pendidikan Islam adalah suatu jenis proses belajar dan tunduk kepada hukum proses belajar.

Dari pembahasan nilai-nilai yang terkandung tentunya patut untuk kita melakukan suatu penghayatan mendalam merupakan suatu jenis belajar dan tunduk pada suatu proses pendidikan dengan kata lain penghayatan merupakan suatu proses belajar dengan kata lain manusia atau hal-hal tertentu menjadi perangsang bagi seseorang untuk mengamalkan atau menghayati nilai-nilai diaplikasikan dalam bentuk perbuatan itu mendapatkan ganjaran dari perbuatan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbangi, Dakir, Umiarso, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Departemen Agama, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Ditjen Bagais, 2005)
- Fajar, Malik, dalam *School Based Management, Ibtisam Abu Duhou*, (Terjm. Oleh Noryamin Aini dkk), (Jakarta: Logos, 2002).
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta Rinneka Cipta, 2004).
- <http://www.scribd.com/doc/65158465/1/Sejarah-Perkembangan-Total-Quality-Management> (diakses tanggal 06 Desember 2021).
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004).

Mulyasa, E., *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004).

Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, (Jogjakarta, Ircisod, 2010).

Soejatmoko, *Etika Kebebasan*, (Jakarta: LP 3 ES, 1998).

Soetopo, Soemanto, W, *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).

S, Supriono & Sapari, Achmad, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Surabaya: Anggota IKAPI, 2001)

Suderadjat, Hari, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: CCG, 2003).

Sugeng Listyo Prabowo, Muhaimin, Suti'ah, *Manajemen Pendidikan Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), Cet. Ke-4.

*Undang-undang Dasar 1945*, (Surabaya: Bina Pustaka Tama, 2002).

Unesco, *Based Management, Ibtisam Abu Duhou*, (Terj. Oleh Noryamin Aini dkk), (Jakarta: Logos, 2002).

Yetri, "Total Quality Management dan Efektifitas Sekolah" Al Idarah Jurnal Manajemen Pendidikan volume 3, 2015.

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mekanisme-peningkatan-mutu-pendidikan-di-tingkat-satuan-pendidikan/> Diakses tanggal 28 Desember 2021

<http://www.scribd.com/doc/65158465/1/Sejarah-Perkembangan-Total-Quality-Management> (diakses tanggal 06 Desember 2021).